



Article

ANALISIS PENGELOLAAN DANA DESA DALAM PEMBANGUNAN INFRASTRUKTUR: STUDI DI DESA JOMBOK

Aisyah Novia Rahma^{1*}, Bintis Ti'anatud Diniati², Indra Marisa³, Ahmad Wildan Misbahul Kirom⁴, Sabil Fadzilah Subekti⁵

¹ Universitas Islam Negeri Sayyid Ali Rahmatullah Tulungagung, Tulungagung, Indonesia; email: aisyahnov445@gmail.com

² Universitas Islam Negeri Sayyid Ali Rahmatullah Tulungagung, Tulungagung, Indonesia; email: bintistd@uinsatu.ac.id

³ Universitas Islam Negeri Sayyid Ali Rahmatullah Tulungagung, Tulungagung, Indonesia; email: indramarisa57@gmail.com

⁴ Universitas Islam Negeri Sayyid Ali Rahmatullah Tulungagung, Tulungagung, Indonesia; email: wildankiromm@gmail.com

⁵ Universitas Islam Negeri Sayyid Ali Rahmatullah Tulungagung, Tulungagung, Indonesia; email: fadzilg8@gmail.com

* Corresponding email: aisyahnov445@gmail.com

ABSTRACT

Village Fund management serves as a strategic instrument for accelerating rural infrastructure development. This study aims to analyze the effectiveness of Village Fund management in Jombok Village, focusing on the planning process, the implementation of the Cash for Work (Padat Karya Tunai/PKT) scheme, and the dynamics of community participation within a Good Governance framework. Employing a case study method, data were analyzed using the Miles and Huberman interactive model. The findings reveal that Village Fund governance in Jombok Village is bolstered by robust inter-institutional coordination, ensuring a structured development cycle. The implementation of the PKT program effectively optimizes local labor absorption and provides immediate economic benefits through daily wage distribution. Furthermore, community participation is comprehensively manifested, ranging from formal planning in the Village Development Planning Meeting (Musrenbangdes) to informal grassroots monitoring. Theoretically, this study confirms that integrating Good Governance principles with the PKT scheme fosters a

KEYWORDS

Cash for Work (PKT), community participation, infrastructure, institutional coordination, village fund.



This article is licensed under a [Creative Commons Attribution 4.0 International License \(CC BY-SA 4.0\)](https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/)
Journal homepage: <https://jurnal.peradabanpublishing.com/index.php/PJEB/index>

participatory and inclusive model of village financial management. Practically, these findings offer recommendations for village governments to enhance transparency and institutional synergy to ensure sustainable rural infrastructure development..

ABSTRAK

Pengelolaan Dana Desa merupakan instrumen strategis dalam mengakselerasi pembangunan infrastruktur perdesaan. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis efektivitas pengelolaan Dana Desa dalam pembangunan infrastruktur di Desa Jombok, dengan fokus pada proses perencanaan, implementasi skema Padat Karya Tunai (PKT), serta peran partisipasi masyarakat dalam kerangka Good Governance. Metode penelitian yang digunakan adalah studi kasus dengan teknik analisis data model interaktif Miles dan Huberman. Temuan penelitian menunjukkan bahwa tata kelola Dana Desa di Desa Jombok didukung oleh koordinasi antarlembagaan desa yang solid, sehingga siklus pembangunan berjalan lebih terstruktur. Implementasi program PKT terbukti mampu mengoptimalkan penyerapan tenaga kerja lokal dan memberikan dampak ekonomi langsung melalui distribusi upah harian. Partisipasi masyarakat termanifestasi secara komprehensif, mulai dari tahap perencanaan melalui Musrenbangdes hingga pengawasan informal di lapangan. Secara teoretis, penelitian ini menegaskan bahwa integrasi prinsip Good Governance dengan skema PKT menciptakan model pengelolaan keuangan desa yang partisipatif dan inklusif. Secara praktis, hasil penelitian ini memberikan rekomendasi bagi pemerintah desa untuk memperkuat transparansi dan sinergi kelembagaan guna menjamin keberlanjutan infrastruktur desa..

KATA KUNCI:

Dana desa, infrastruktur, koordinasi kelembagaan, Padat Karya Tunai (PKT), partisipasi masyarakat

PENDAHULUAN

Pembangunan nasional Indonesia bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat secara merata dan mengurangi ketimpangan antarwilayah. Dalam kerangka tersebut, Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa memberikan posisi strategis bagi desa sebagai subjek pembangunan dengan kewenangan yang lebih luas dalam mengelola sumber daya dan menentukan prioritas pembangunan sesuai kebutuhan lokal (Republik Indonesia, 2014). Salah satu instrumen utama kebijakan ini adalah Dana Desa, yang dirancang sebagai bentuk desentralisasi fiskal untuk memperkuat kapasitas keuangan desa dan mendorong pembangunan berbasis kebutuhan lokal (Bahl & Linn, 2006; Kementerian Keuangan Republik Indonesia, 2017).

Meskipun alokasi Dana Desa terus meningkat, berdasarkan temuan penelitian terdahulu, peningkatan anggaran tidak secara otomatis berbanding lurus dengan peningkatan kualitas pembangunan desa (Aspinall & Berenschot, 2019; Syam et al., 2023). Wilayah perdesaan masih menghadapi persoalan keterbatasan infrastruktur, tingkat kemiskinan yang relatif tinggi, serta ketimpangan akses ekonomi dibandingkan wilayah perkotaan (Thandriyono et al., 2024). Kondisi ini mengindikasikan bahwa persoalan utama Dana Desa tidak hanya terletak pada besaran dana, tetapi juga pada kualitas tata kelola dan pola implementasinya di tingkat desa (World Bank, 2017).

Sejumlah penelitian terdahulu di Indonesia menyoroti berbagai permasalahan dalam

pengelolaan Dana Desa, antara lain partisipasi masyarakat yang bersifat formal dan tidak substantif, lemahnya transparansi dan pengawasan anggaran, serta dominasi kontraktor atau tenaga kerja dari luar desa yang membatasi distribusi manfaat ekonomi bagi masyarakat lokal (Ningsih & Handayani, 2020). Berbagai persoalan tersebut membuka peluang terjadinya inefisiensi dan kebocoran anggaran, sehingga tujuan pemerataan kesejahteraan melalui Dana Desa belum sepenuhnya tercapai (Aspinall & Berenschot, 2019; Indonesia Corruption Watch, 2020).

Namun demikian, literatur mengenai Dana Desa masih didominasi oleh kajian yang menekankan kegagalan dan problematika implementasi, sementara penelitian yang mengkaji praktik pengelolaan Dana Desa yang relatif berhasil dan partisipatif masih terbatas (Berenschot & Van Klinken, 2018; Cahyani et al., 2024). Padahal, studi mengenai praktik keberhasilan sangat penting sebagai bahan pembelajaran dan pembandingan untuk merumuskan model pengelolaan Dana Desa yang lebih efektif dan berkelanjutan (World Bank, 2017). Keterbatasan kajian semacam ini menunjukkan adanya *research gap* yang perlu diisi.

Dalam konteks empiris desa, Desa Jombok di Kecamatan Pule, Kabupaten Trenggalek, menjadi kasus yang menarik untuk diteliti. Desa ini menunjukkan praktik pengelolaan Dana Desa yang menekankan partisipasi masyarakat sejak tahap perencanaan melalui Musyawarah Perencanaan Pembangunan Desa (Musrenbangdes), serta penerapan pembangunan infrastruktur berbasis Padat Karya Tunai (PKT) dengan memanfaatkan tenaga kerja lokal (Kementerian Desa PDTT, 2018). Pendekatan ini tidak hanya diarahkan pada pencapaian output fisik, tetapi juga pada distribusi manfaat ekonomi dan penguatan keterlibatan masyarakat dalam pembangunan desa (Fikriyah et al., 2023; Piani et al., 2024).

Berdasarkan *research gap* tersebut, penelitian ini difokuskan pada analisis pengelolaan Dana Desa dalam pembangunan infrastruktur di Desa Jombok dengan menitikberatkan pada aspek perencanaan, pelaksanaan pembangunan berbasis Padat Karya Tunai (PKT), serta peran partisipasi masyarakat dalam kerangka Good Governance (OECD, 2015; UNDP, 2014). Secara spesifik, penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pengelolaan pembangunan infrastruktur di Desa Jombok yang mencakup keseluruhan siklus proyek, mulai dari tahapan perencanaan dan pelaksanaan berbasis optimalisasi tenaga kerja lokal, hingga mekanisme pengawasan serta strategi pemerintah desa dalam mengatasi berbagai kendala operasional yang muncul. Selain itu, penelitian ini juga diarahkan untuk membedah peran partisipasi masyarakat sebagai determinan kunci dalam keberhasilan pembangunan infrastruktur desa, terutama apabila ditinjau melalui kerangka *Good Governance* dan prinsip desentralisasi fiskal (World Bank, 2017).

Secara teoretis, penelitian ini diharapkan berkontribusi dalam memperkaya kajian *Good Governance* dan desentralisasi fiskal. Kontribusi tersebut ditunjukkan melalui temuan bahwa tata kelola Dana Desa yang partisipatif dapat berfungsi sebagai instrumen ekonomi lokal, bukan sekadar mekanisme administratif (OECD, 2015; Todaro & Smith, 2015). Secara praktis, penelitian ini memberikan rujukan bagi pemerintah desa dan pemangku kepentingan terkait dalam merancang model pengelolaan Dana Desa yang lebih inklusif, berkelanjutan, dan berorientasi pada pemerataan manfaat pembangunan.

TINJAUAN PUSTAKA DAN KERANGKA TEORIS

Bagian ini menyajikan landasan teoretis yang digunakan untuk memahami dan menganalisis pengelolaan Dana Desa dalam pembangunan infrastruktur di Desa Jombok. Kerangka teori tidak hanya berfungsi sebagai rujukan konseptual, tetapi juga sebagai alat analisis yang akan digunakan untuk membaca temuan empiris pada bagian pembahasan.

Teori Good Governance

Konsep *Good Governance* berkembang sebagai respons atas tuntutan pengelolaan pemerintahan yang lebih terbuka, bertanggung jawab, dan melibatkan masyarakat. (World Bank, 2017) memaknai *Good Governance* sebagai cara kekuasaan publik dijalankan dalam mengelola sumber daya ekonomi dan sosial demi kepentingan pembangunan. Sementara itu, (OECD, 2015) menekankan bahwa tata kelola yang baik berkaitan dengan proses pengambilan keputusan yang transparan, akuntabel, dan inklusif. (UNDP, 2014) juga menambahkan bahwa *Good Governance* harus mampu menjamin partisipasi masyarakat serta keadilan dalam distribusi manfaat pembangunan. Dalam konteks pengelolaan Dana Desa, *Good Governance* umumnya dipahami melalui tiga prinsip utama, yaitu transparansi, akuntabilitas, dan partisipasi. Transparansi merujuk pada keterbukaan pemerintah desa dalam menyediakan informasi terkait perencanaan, penggunaan, dan pelaporan Dana Desa. Informasi yang mudah diakses memungkinkan masyarakat mengetahui bagaimana dana publik digunakan serta mengurangi potensi penyimpangan. Akuntabilitas berkaitan dengan kewajiban pemerintah desa untuk mempertanggungjawabkan setiap penggunaan dana kepada masyarakat dan pemerintah di atasnya. Prinsip ini menuntut kesesuaian antara perencanaan, pelaksanaan, dan hasil pembangunan. Partisipasi menempatkan masyarakat sebagai bagian dari proses pengambilan keputusan, bukan sekadar penerima manfaat. Pelibatan warga sejak tahap perencanaan hingga pengawasan diyakini dapat meningkatkan kualitas kebijakan dan menumbuhkan rasa memiliki terhadap hasil pembangunan. Dalam penelitian ini, ketiga prinsip *Good Governance* tersebut digunakan untuk menilai sejauh mana pengelolaan pembangunan infrastruktur di Desa Jombok berjalan sesuai dengan tata kelola yang baik.

Desentralisasi Fiskal dan Dana Desa

Desentralisasi fiskal merupakan kebijakan yang memberikan kewenangan keuangan kepada pemerintah daerah dan desa untuk mengatur serta mengelola sumber daya sesuai dengan kebutuhan lokal (Bahl & Linn, 2006; Todaro & Smith, 2015). Dana Desa menjadi salah satu bentuk nyata dari kebijakan ini, dengan tujuan utama mempercepat pembangunan desa, meningkatkan kesejahteraan masyarakat, serta mengurangi kesenjangan antarwilayah (Republik Indonesia, 2014). Melalui Dana Desa, pemerintah pusat memberikan ruang bagi desa untuk menentukan prioritas pembangunan secara mandiri (Kementerian Keuangan Republik Indonesia, 2017). Desa diharapkan mampu merancang program yang sesuai dengan kondisi sosial, ekonomi, dan geografis setempat. Dalam praktiknya, Dana Desa banyak diarahkan untuk pembangunan infrastruktur dasar dan pemberdayaan masyarakat (Kementerian Desa PDTT, 2018). Namun, desentralisasi fiskal juga membawa risiko apabila tidak diiringi dengan tata kelola yang memadai. Lemahnya kapasitas aparatur desa, minimnya pengawasan, serta rendahnya transparansi dapat memicu inefisiensi dan penyimpangan anggaran (Aspinall & Berenschot, 2019; Ningsih & Handayani, 2020). Oleh

karena itu, Dana Desa menuntut sistem pengelolaan yang tertib, terbuka, dan partisipatif agar tujuan desentralisasi fiskal benar-benar tercapai (World Bank, 2017). Dalam penelitian ini, konsep desentralisasi fiskal digunakan untuk melihat bagaimana kewenangan pengelolaan Dana Desa di Desa Jombok dijalankan, serta bagaimana pemerintah desa mengelola risiko tata kelola yang mungkin muncul dalam pelaksanaan pembangunan infrastruktur.

Padat Karya Tunai (PKT) dan Ekonomi Lokal

Program Padat Karya Tunai (PKT) merupakan pendekatan pembangunan yang mengutamakan penggunaan tenaga kerja lokal dalam pelaksanaan proyek, khususnya pembangunan infrastruktur (Kementerian Desa PDTT, 2018). PKT dirancang sebagai instrumen distribusi pendapatan, di mana masyarakat memperoleh upah langsung dari keterlibatan mereka dalam kegiatan pembangunan (Kementerian Keuangan Republik Indonesia, 2017). Dalam konteks ekonomi lokal, PKT memiliki peran penting karena pendapatan yang diterima pekerja akan kembali beredar di desa. Perputaran uang ini menciptakan *multiplier effect*, yaitu dampak lanjutan berupa peningkatan konsumsi, tumbuhnya usaha kecil, dan menguatnya aktivitas ekonomi lokal (Piani et al., 2024; Todaro & Smith, 2015). Dengan demikian, pembangunan infrastruktur tidak hanya menghasilkan aset fisik, tetapi juga memberikan manfaat ekonomi jangka pendek bagi Masyarakat. Selain aspek ekonomi, PKT juga berkontribusi pada penguatan partisipasi masyarakat. Keterlibatan langsung warga dalam pembangunan menumbuhkan rasa memiliki terhadap hasil proyek, sehingga meningkatkan peluang keberlanjutan dan pemeliharaan infrastruktur (Fikriyah et al., 2023; UNDP, 2014). Dalam penelitian ini, PKT diposisikan sebagai mekanisme yang menghubungkan pengelolaan Dana Desa dengan pemberdayaan ekonomi masyarakat Desa Jombok.

Kritik Dana Desa dalam Literatur Pembanding

Meskipun Dana Desa memiliki tujuan yang kuat, berbagai penelitian menunjukkan adanya sejumlah persoalan dalam implementasinya (Aspinall & Berenschot, 2019; Ningsih & Handayani, 2020). Salah satu kritik yang sering muncul adalah minimnya partisipasi masyarakat dalam perencanaan dan pelaksanaan pembangunan (Fikriyah et al., 2023; Sujarweni, 2015). Dalam banyak kasus, masyarakat hanya dilibatkan secara formal tanpa memiliki pengaruh nyata dalam pengambilan keputusan (World Bank, 2017). Kritik berikutnya berkaitan dengan kebocoran anggaran (*leakage*). Lemahnya transparansi dan pengawasan membuka peluang terjadinya penyimpangan, baik dalam bentuk mark-up anggaran maupun kualitas pekerjaan yang tidak sesuai standar (Aspinall & Berenschot, 2019; Indonesia Corruption Watch, 2020). Selain itu, manfaat pembangunan sering kali bersifat eksklusif, hanya dinikmati oleh kelompok tertentu, sementara masyarakat luas tidak memperoleh dampak yang signifikan (Berenschot & Van Klinken, 2018). Literatur yang menyoroti berbagai persoalan tersebut umumnya menempatkan Dana Desa sebagai kebijakan yang belum sepenuhnya efektif akibat lemahnya tata kelola (Ningsih & Handayani, 2020). Namun, pendekatan ini jarang mengangkat kasus-kasus desa yang berhasil mengelola Dana Desa secara lebih partisipatif dan akuntabel. Oleh karena itu, kritik Dana Desa dalam penelitian ini digunakan sebagai pembanding untuk membaca praktik pengelolaan Dana Desa di Desa Jombok. Dengan membandingkan temuan empiris dengan kritik dalam literatur, penelitian ini berupaya menilai apakah Desa Jombok mampu menghadirkan pola pengelolaan yang berbeda dari kecenderungan umum yang sering dilaporkan.

METODE

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan jenis penelitian studi kasus. Pendekatan kualitatif dipilih karena tujuan penelitian tidak diarahkan untuk mengukur atau menguji hubungan variabel secara statistik, melainkan untuk memahami secara mendalam proses pengelolaan Alokasi Dana Desa (ADD) dalam pembangunan infrastruktur. Fokus utama penelitian adalah bagaimana prinsip-prinsip *Good Governance*, desentralisasi fiskal, dan partisipasi masyarakat diwujudkan dalam praktik pengelolaan Dana Desa di tingkat desa.

Jenis studi kasus digunakan karena penelitian ini menelaah satu unit sosial secara intensif dan kontekstual, yaitu Desa Jombok, Kecamatan Pule, Kabupaten Trenggalek. Studi kasus memungkinkan peneliti menggali realitas sosial secara utuh, termasuk dinamika perencanaan, pelaksanaan, pengawasan, serta strategi adaptasi pemerintah desa dalam menghadapi kendala operasional. Dengan pendekatan ini, penelitian diharapkan mampu menghasilkan pemahaman yang mendalam dan relevan secara teoritis, bukan sekadar deskripsi permukaan.

Pemilihan lokasi penelitian dilakukan secara purposif dengan pertimbangan argumentatif. Desa Jombok dipilih karena memiliki karakteristik wilayah pegunungan yang menuntut pembangunan infrastruktur dengan perencanaan dan pengelolaan yang cermat. Selain itu, desa ini dikenal menerapkan pola pembangunan berbasis partisipasi masyarakat dan Padat Karya Tunai (PKT), yang relevan dengan fokus penelitian mengenai *Good Governance* dan pemberdayaan ekonomi lokal. Kondisi tersebut menjadikan Desa Jombok sebagai lokasi yang representatif untuk mengkaji praktik pengelolaan Dana Desa yang relatif berbeda dari kritik dominan dalam literatur.

Subjek penelitian difokuskan pada perangkat Desa Jombok yang memiliki keterlibatan langsung dalam pengelolaan ADD, khususnya dalam aspek perencanaan, penganggaran, dan pelaksanaan pembangunan infrastruktur. Informan meliputi aparat desa yang memahami proses administrasi dan teknis pembangunan. Pemilihan informan dilakukan menggunakan teknik purposive sampling, yaitu dengan memilih individu yang dinilai paling mengetahui, memahami, dan terlibat aktif dalam pengelolaan Dana Desa. Teknik ini dipilih agar data yang diperoleh benar-benar relevan dan mendalam sesuai tujuan analisis penelitian.

Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini dilakukan melalui wawancara mendalam sebagai metode utama. Wawancara dipilih karena memungkinkan peneliti menggali pengalaman, pandangan, serta pemahaman informan mengenai praktik pengelolaan ADD secara langsung. Peneliti menggunakan pedoman wawancara semiterstruktur agar proses penggalan data tetap terarah, namun tetap memberi ruang bagi informan untuk menyampaikan informasi secara bebas dan luas. Untuk mendukung kelancaran pengumpulan data, peneliti menggunakan alat bantu berupa buku catatan, alat perekam suara, dan daftar pertanyaan wawancara.

Analisis data dilakukan dengan menggunakan model analisis interaktif Miles dan Huberman, yang mencakup tiga tahapan utama, yaitu reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan. Pada tahap reduksi data, peneliti menyeleksi dan memilah informasi penting dari hasil wawancara yang relevan dengan fokus penelitian. Data yang telah diseleksi

kemudian diorganisasikan berdasarkan tema-tema utama, seperti perencanaan partisipatif, pelaksanaan berbasis tenaga kerja lokal, transparansi anggaran, serta kendala operasional.

Tahap selanjutnya adalah penyajian data, di mana hasil reduksi disusun dalam bentuk narasi deskriptif-analitis untuk memberikan gambaran yang jelas mengenai mekanisme pengelolaan ADD di Desa Jombok. Penyajian data ini disusun dengan mengaitkan temuan lapangan dengan kerangka teori *Good Governance*, desentralisasi fiskal, dan PKT sebagai instrumen ekonomi lokal. Tahap terakhir adalah penarikan kesimpulan, yaitu merumuskan temuan penelitian berdasarkan pola, hubungan, dan makna yang muncul dari data.

Keterkaitan antara metode penelitian dan tujuan analisis menjadi aspek penting dalam penelitian ini. Pendekatan kualitatif dan studi kasus memungkinkan peneliti menilai secara mendalam bagaimana prinsip transparansi, akuntabilitas, dan partisipasi dijalankan dalam praktik, serta bagaimana kebijakan PKT berkontribusi terhadap pemberdayaan masyarakat dan ekonomi lokal. Dengan demikian, metode yang digunakan tidak hanya relevan secara teknis, tetapi juga sah secara teoritis untuk menarik kesimpulan analitis.

Untuk menjaga keabsahan data, penelitian ini menggunakan teknik triangulasi sumber. Peneliti membandingkan informasi yang diperoleh dari wawancara dengan perangkat desa dengan dokumen pendukung yang tersedia di desa, serta mencocokkannya dengan keterangan dari informan lain apabila diperlukan. Selain itu, peneliti juga melakukan *member check*, yaitu mengonfirmasi hasil sementara penelitian kepada informan untuk memastikan bahwa interpretasi peneliti sesuai dengan kondisi yang sebenarnya. Melalui langkah-langkah tersebut, validitas dan reliabilitas data diupayakan agar hasil penelitian dapat dipertanggungjawabkan secara ilmiah.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Pengelolaan Dana Desa dalam Perspektif Good Governance (Analisis Teoretis)

Temuan penelitian menunjukkan bahwa pengelolaan Alokasi Dana Desa (ADD) di Desa Jombok tidak hanya berjalan secara administratif, tetapi juga mencerminkan upaya penerapan prinsip-prinsip *Good Governance* dalam praktik. Dalam kerangka tata kelola keuangan publik, World Bank memandang *Good Governance* bukan sekadar kepatuhan prosedural, melainkan sebagai kemampuan institusi publik untuk mengelola sumber daya secara transparan, akuntabel, dan responsif terhadap kebutuhan masyarakat (World Bank, 2017). OECD juga menegaskan bahwa kualitas tata kelola ditentukan oleh sejauh mana masyarakat dapat mengakses informasi, terlibat dalam pengambilan keputusan, serta melakukan pengawasan terhadap penggunaan anggaran publik (OECD, 2015).

Dalam konteks transparansi, praktik di Desa Jombok menunjukkan pergeseran dari transparansi formal menuju transparansi fungsional (Rusdi, 2021). Informasi mengenai perencanaan dan penggunaan Dana Desa tidak hanya dipublikasikan sebagai kewajiban administratif, tetapi juga disajikan dalam bentuk yang mudah diakses oleh masyarakat melalui papan pengumuman dan media digital desa. Dari pengamatan di lapangan, masyarakat dapat mengetahui alokasi anggaran secara jelas dan memahami kegiatan yang akan dilaksanakan. Hal ini diperkuat oleh pernyataan salah satu warga yang menyampaikan bahwa: "*informasi anggaran pembangunan desa biasanya dipasang di papan pengumuman, jadi kami tahu kegiatan apa saja yang akan dikerjakan dan dananya dari mana.*" (Warga Desa

A, 2025). Jika dibandingkan dengan temuan (Ningsih & Handayani, 2020) yang menunjukkan bahwa transparansi Dana Desa di banyak wilayah berhenti pada penyampaian laporan internal, praktik di Desa Jombok membuka ruang bagi masyarakat untuk mengetahui dan memahami alokasi anggaran secara lebih nyata. Dengan demikian, transparansi berfungsi sebagai mekanisme awal pengendalian sosial, meskipun pengawasan warga masih bersifat informal.

Dari sisi akuntabilitas, pengelolaan ADD di Desa Jombok memperlihatkan adanya pembagian peran yang relatif jelas antarperangkat desa. Bendahara desa bertanggung jawab atas pencatatan dan pelaporan keuangan, sementara pelaksana kegiatan dan kepala desa melakukan pengawasan terhadap kesesuaian antara rencana dan realisasi. Berdasarkan informasi dari aparat desa, setiap kendala yang muncul, seperti kenaikan harga material atau hambatan cuaca, selalu dibahas melalui koordinasi dan musyawarah internal. Pola ini menunjukkan adanya tanggung jawab institusional, meskipun masih membutuhkan penguatan dokumentasi dan mekanisme evaluasi formal (OECD, 2015).

Partisipasi masyarakat melalui Musyawarah Perencanaan Pembangunan Desa (Musrenbangdes) menjadi elemen yang paling menonjol dalam pengelolaan ADD di Desa Jombok. Berbeda dengan kritik dalam literatur yang menyebut Musrenbangdes sering bersifat simbolik dan didominasi elite desa (Hurriyaturrohman et al., 2021), Musrenbangdes di Desa Jombok berfungsi sebagai arena deliberasi yang relatif inklusif. Data lapangan mencatat pengamatan dan laporan warga yang menunjukkan bahwa berbagai kelompok masyarakat diberikan kesempatan untuk menyampaikan aspirasi dan menentukan prioritas pembangunan. Hal ini sebagaimana disampaikan oleh salah satu warga yang mengikuti Musrenbangdes: *"Dalam musyawarah desa, kami dari RT dan kelompok masyarakat memang diminta menyampaikan usulan. Beberapa usulan warga kemudian dipilih sebagai prioritas pembangunan desa."* (Warga Desa A, 2025).

Keterlibatan berbagai kelompok masyarakat menunjukkan bahwa partisipasi tidak berhenti pada kehadiran formal, tetapi berkontribusi pada penentuan prioritas pembangunan. Temuan ini memperkuat argumen bahwa kualitas tata kelola Dana Desa sangat bergantung pada desain dan praktik partisipasi di tingkat lokal, bukan semata pada regulasi nasional.

Padat Karya Tunai (PKT) sebagai Model Partisipasi dan Distribusi Pendapatan

Salah satu temuan utama penelitian ini adalah penerapan Padat Karya Tunai (PKT) dalam pembangunan infrastruktur desa. Di Desa Jombok, seluruh proses pembangunan fisik dikerjakan oleh tenaga kerja lokal. Tukang dan buruh yang terlibat merupakan warga desa sendiri yang memiliki keterampilan di bidang konstruksi. Kebijakan ini secara sadar diambil oleh pemerintah desa untuk menghindari ketergantungan pada kontraktor luar sekaligus membuka kesempatan kerja bagi masyarakat setempat. Salah satu warga yang terlibat dalam kegiatan Padat Karya Tunai menyatakan: *"Kami senang bisa bekerja di proyek desa sendiri, selain mendapat penghasilan, kami juga belajar keterampilan baru."* (Pekerja PKT A, 2025).

Dari sisi partisipasi, PKT mendorong keterlibatan masyarakat tidak hanya sebagai penerima manfaat, tetapi sebagai pelaku langsung pembangunan. Warga terlibat sejak tahap perencanaan hingga pelaksanaan, bahkan dalam proses pengawasan informal. Hal ini

menciptakan rasa kebersamaan dan memperkuat hubungan antara pemerintah desa dan masyarakat. Partisipasi semacam ini bersifat substantif, bukan simbolik, karena masyarakat memiliki peran nyata dalam menentukan dan melaksanakan pembangunan.

Dampak ekonomi langsung dari PKT juga cukup signifikan. Upah harian yang diterima pekerja menjadi sumber pendapatan tambahan bagi rumah tangga desa. Pendapatan tersebut kemudian dibelanjakan kembali di lingkungan sekitar desa, sehingga memicu perputaran ekonomi lokal. Fenomena ini menunjukkan adanya *multiplier effect*, di mana Dana Desa tidak hanya menghasilkan infrastruktur fisik, tetapi juga menggerakkan aktivitas ekonomi masyarakat secara langsung.

Selain itu, keterlibatan masyarakat dalam pembangunan menumbuhkan rasa memiliki terhadap hasil proyek. Infrastruktur yang dibangun oleh tangan masyarakat sendiri cenderung dirawat dengan lebih baik dibandingkan proyek yang sepenuhnya dikerjakan oleh pihak luar. Rasa memiliki ini menjadi modal sosial penting bagi keberlanjutan pembangunan desa (Suratmoko, 2024). Dengan demikian, PKT di Desa Jombok tidak hanya berfungsi sebagai alat distribusi pendapatan, tetapi juga sebagai mekanisme penguatan partisipasi dan kohesi sosial.

Desa Jombok sebagai Counter-Example dalam Literatur Dana Desa

Literatur mengenai Dana Desa di Indonesia cenderung menyoroti berbagai persoalan implementasi, seperti minimnya partisipasi masyarakat, dominasi kontraktor luar, serta tingginya potensi kebocoran anggaran (*leakage*) yang menyebabkan manfaat pembangunan tidak terdistribusi secara merata (Hurriyaturrohman et al., 2021; Ningsih & Handayani, 2020). Dalam konteks ini, temuan penelitian di Desa Jombok menunjukkan pola yang berbeda dan dapat diposisikan sebagai *counter-example* terhadap kecenderungan dominan tersebut. Dalam wawancara, seorang tokoh masyarakat menjelaskan bahwa keterlibatan warga tidak hanya bersifat formal. Ia menyampaikan: *"Biasanya sebelum proyek dimulai, warga dikumpulkan dalam musyawarah desa untuk menentukan kegiatan apa yang diprioritaskan. Setelah itu, pembagian kerja juga melibatkan warga sekitar, sehingga tidak ada yang merasa diabaikan."* (Tokoh Masyarakat A, 2025).

Jika dibandingkan dengan studi-studi yang mengkritik rendahnya partisipasi, praktik di Desa Jombok memperlihatkan bahwa masyarakat tidak hanya dilibatkan dalam perencanaan melalui Musrenbangdes, tetapi juga menjadi pelaku utama dalam pelaksanaan pembangunan melalui skema Padat Karya Tunai (PKT). Partisipasi semacam ini bersifat substantif karena masyarakat memperoleh peran, tanggung jawab, dan manfaat ekonomi secara langsung (Cahyani et al., 2024). Hal ini berbeda dengan temuan (Hurriyaturrohman et al., 2021) yang menunjukkan bahwa partisipasi warga dalam pembangunan desa sering kali bersifat simbolik dan tidak berdampak pada distribusi manfaat.

Dominasi kontraktor luar yang sering dikaitkan dengan kebocoran anggaran juga tidak ditemukan dalam kasus Desa Jombok. Seluruh kegiatan pembangunan infrastruktur dikerjakan oleh tenaga kerja lokal, sehingga aliran dana lebih terkonsentrasi di dalam desa. Dalam perspektif ekonomi politik pembangunan desa, pola ini berimplikasi pada menurunnya risiko *leakage* sekaligus meningkatkan sirkulasi ekonomi lokal. Dengan kata lain, PKT di Desa Jombok berfungsi ganda sebagai instrumen distribusi pendapatan dan mekanisme kontrol sosial terhadap penggunaan anggaran.

Temuan ini menunjukkan bahwa permasalahan Dana Desa yang sering dikritisi dalam literatur tidak bersifat inheren pada kebijakan itu sendiri, melainkan pada model tata kelola yang diterapkan. Desa Jombok memperlihatkan bahwa integrasi antara prinsip *Good Governance* dan PKT dapat menghasilkan alternative governance model dalam pengelolaan Dana Desa. Model ini tidak hanya berorientasi pada pencapaian output fisik, tetapi juga pada proses partisipatif dan pemerataan manfaat ekonomi. Hasil wawancara informal menunjukkan adanya peningkatan kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah desa. Salah satu tokoh masyarakat menyampaikan bahwa keterlibatan warga dalam proses pengambilan keputusan membuat pemerintah desa lebih dipercaya. *"Kalau sekarang ini, warga lebih percaya karena setiap rencana dibahas bersama. Kami dilibatkan sejak awal, jadi tahu prosesnya seperti apa," (Tokoh Masyarakat A, 2025).*

Implikasi Ekonomi dan Bisnis Berkelanjutan

Pengelolaan Dana Desa di Desa Jombok memiliki implikasi yang relevan dengan perspektif ekonomi dan bisnis berkelanjutan, sebagaimana menjadi fokus *Peradaban Journal of Economic and Business*. Pembangunan infrastruktur berbasis PKT tidak hanya menghasilkan aset fisik, tetapi juga menciptakan nilai ekonomi jangka pendek dan jangka menengah bagi masyarakat desa. Seorang pekerja Padat Karya Tunai yang terlibat dalam pembangunan jalan desa menjelaskan bahwa upah harian yang diterimanya sangat membantu kebutuhan rumah tangga. Ia menyatakan: *"Dengan pekerjaan ini, kami bisa menambah penghasilan keluarga dan membeli kebutuhan sehari-hari. Biasanya upahnya langsung dipakai untuk belanja dapur dan keperluan sekolah anak, jadi ekonomi keluarga terasa lebih stabil." (Pekerja PKT A, 2025).*

Multiplier effect yang muncul dari distribusi pendapatan melalui upah PKT memperkuat daya beli masyarakat dan mendorong aktivitas ekonomi lokal. Perputaran uang di tingkat desa berpotensi mendukung tumbuhnya usaha kecil, meningkatkan konsumsi lokal, dan memperkuat ketahanan ekonomi desa. Dalam jangka panjang, infrastruktur yang lebih baik juga membuka peluang peningkatan produktivitas sektor pertanian dan akses pasar yang lebih luas.

Selain itu, pemberdayaan tenaga kerja lokal menciptakan basis keterampilan yang dapat dimanfaatkan untuk pembangunan selanjutnya. Masyarakat tidak hanya menjadi pekerja sementara, tetapi juga memiliki pengalaman dan kemampuan yang dapat dikembangkan menjadi aktivitas ekonomi berkelanjutan. Dari sudut pandang bisnis, pola ini menunjukkan bahwa Dana Desa dapat menjadi instrumen investasi sosial yang menghasilkan manfaat ekonomi dan sosial secara bersamaan.

Secara keseluruhan, temuan penelitian ini menunjukkan bahwa pengelolaan Dana Desa yang berbasis *Good Governance* dan PKT berpotensi menjadi strategi pembangunan desa yang berkelanjutan. Desa Jombok memberikan contoh bahwa dengan tata kelola yang tepat, Dana Desa dapat dikelola secara efektif untuk mendorong pembangunan infrastruktur, memperkuat ekonomi lokal, dan menekan berbagai risiko yang selama ini menjadi kritik utama dalam literatur.

Analisis Teoretis dan Kontribusi Konseptual Penelitian

Temuan penelitian di Desa Jombok memberikan implikasi teoretis yang penting

dalam kajian pengelolaan keuangan publik dan pembangunan ekonomi lokal. Selama ini, diskursus mengenai Dana Desa dalam literatur ekonomi dan manajemen publik lebih banyak menekankan pada persoalan implementasi, seperti lemahnya kapasitas aparatur desa, minimnya partisipasi masyarakat, serta tingginya risiko kebocoran anggaran akibat dominasi aktor eksternal, khususnya kontraktor luar. Akibatnya, Dana Desa kerap diposisikan sebagai kebijakan yang problematik dari sisi tata kelola. Penelitian ini menawarkan sudut pandang alternatif dengan menunjukkan bahwa permasalahan tersebut tidak bersifat inheren pada kebijakan Dana Desa, melainkan sangat ditentukan oleh model tata kelola yang diterapkan di tingkat lokal. Salah seorang perangkat desa menyebutkan: *“Kuncinya ada pada keterbukaan dan keterlibatan warga. Jadi, sejak musyawarah perencanaan sampai pelaksanaan, warga kami libatkan supaya mereka bisa ikut memantau dan menentukan penggunaan dana.”* (Perangkat Desa A, 2025).

Dalam kerangka *Good Governance* yang dikemukakan oleh (OECD, 2015; World Bank, 2017), transparansi, akuntabilitas, dan partisipasi tidak dipahami sebagai prinsip normatif semata, tetapi sebagai mekanisme yang memengaruhi efisiensi alokasi sumber daya publik. Temuan di Desa Jombok menunjukkan bahwa transparansi anggaran yang dilakukan secara terbuka memungkinkan masyarakat untuk mengetahui arah penggunaan dana dan secara tidak langsung melakukan kontrol sosial. Meskipun kontrol ini belum terlembagakan secara formal, praktik tersebut telah berkontribusi dalam menekan potensi penyimpangan anggaran. Hal ini memperkuat argumen dalam literatur tata kelola bahwa transparansi yang bersifat fungsional bukan sekadar administratif memiliki dampak nyata terhadap kualitas pengelolaan keuangan publik.

Dari perspektif akuntabilitas, pengelolaan Alokasi Dana Desa di Desa Jombok memperlihatkan hubungan yang erat antara tanggung jawab administratif dan tanggung jawab sosial. Akuntabilitas tidak hanya diwujudkan melalui laporan keuangan dan pertanggungjawaban formal, tetapi juga melalui kesediaan pemerintah desa untuk menjelaskan dan menyesuaikan kebijakan ketika menghadapi kendala lapangan, seperti fluktuasi harga material atau kondisi cuaca. Dalam konteks manajemen keuangan publik, praktik semacam ini mencerminkan bentuk akuntabilitas adaptif, di mana pengambilan keputusan tidak kaku pada rencana awal, tetapi responsif terhadap dinamika lingkungan.

Partisipasi masyarakat melalui Musrenbangdes dan skema Padat Karya Tunai (PKT) juga memiliki makna teoretis yang lebih luas. PKT dalam penelitian ini tidak hanya berfungsi sebagai instrumen pelaksanaan proyek, tetapi sebagai mekanisme distribusi pendapatan yang secara langsung memengaruhi struktur ekonomi lokal. Dengan melibatkan tenaga kerja lokal, Dana Desa berfungsi sebagai alat injeksi ekonomi yang meningkatkan daya beli masyarakat dan memperkuat sirkulasi ekonomi di dalam desa. Dalam perspektif ekonomi pembangunan, pola ini sejalan dengan konsep *local multiplier effect*, di mana belanja publik yang diarahkan secara lokal menghasilkan dampak ekonomi berlapis.

Lebih jauh, temuan ini memberikan kontribusi pada kajian ekonomi kelembagaan dengan menunjukkan bahwa tata kelola yang partisipatif dapat mengurangi biaya transaksi dan risiko kebocoran anggaran. Ketika masyarakat terlibat langsung dalam pelaksanaan pembangunan, relasi antara pemerintah desa dan warga tidak lagi bersifat hierarkis, melainkan kooperatif. Relasi semacam ini memperkuat mekanisme pengawasan sosial dan

meningkatkan rasa memiliki terhadap hasil pembangunan. Dengan demikian, keberhasilan pembangunan tidak hanya diukur dari output fisik, tetapi juga dari kualitas proses kelembagaan yang menopangnya.

KESIMPULAN

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pengelolaan pembangunan infrastruktur Dana Desa di Desa Jombok, khususnya dalam kaitannya dengan penerapan prinsip *Good Governance* dan peran partisipasi masyarakat melalui skema Padat Karya Tunai (PKT). Tujuan tersebut diarahkan untuk memahami bagaimana desain tata kelola di tingkat desa memengaruhi efektivitas pemanfaatan Dana Desa dalam konteks desentralisasi fiskal. Hasil penelitian menunjukkan bahwa efektivitas pengelolaan Alokasi Dana Desa (ADD) di Desa Jombok tidak semata ditentukan oleh besaran dana yang diterima, melainkan oleh kualitas tata kelola dan pola pelibatan masyarakat dalam seluruh siklus pembangunan. Integrasi prinsip transparansi, akuntabilitas, dan partisipasi memungkinkan pembangunan infrastruktur tidak hanya memenuhi kebutuhan fisik desa, tetapi juga menghasilkan dampak ekonomi dan sosial yang lebih luas. Transparansi anggaran berfungsi sebagai mekanisme kontrol sosial yang mendorong kepercayaan masyarakat, akuntabilitas tercermin dalam fleksibilitas pengelolaan saat menghadapi kendala lapangan, sementara partisipasi masyarakat melalui Musrenbangdes dan pelaksanaan PKT terbukti memperluas pemerataan manfaat pembangunan. Penelitian ini memiliki keterbatasan karena hanya berfokus pada satu studi kasus, sehingga temuan tidak dimaksudkan untuk digeneralisasi secara luas. Selain itu, penggunaan data kualitatif yang bersumber terutama dari wawancara membuka ruang bagi subjektivitas informan, meskipun telah diupayakan triangulasi data untuk menjaga validitas temuan. Selain itu tidak semua temuan didukung oleh dokumentasi formal atau visual. Berdasarkan keterbatasan tersebut, penelitian selanjutnya disarankan untuk menggunakan pendekatan metode campuran (*mixed methods*) serta melakukan perbandingan lintas desa dengan karakteristik sosial, ekonomi, dan geografis yang berbeda. Penelitian lanjutan juga dapat menguji keberlanjutan dan replikabilitas model tata kelola alternatif yang ditemukan, sehingga kontribusinya terhadap pengembangan kebijakan Dana Desa dapat diperkuat secara empiris.

DAFTAR PUSTAKA

- Aspinall, E., & Berenschot, W. (2019). *Democracy for sale: Elections, clientelism, and the state in Indonesia*. Ithaca, NY: Cornell University Press.
- Bahl, R., & Linn, J. F. (2006). *Sequencing fiscal decentralization*. Washington, DC: World Bank.
- Berenschot, W., & Van Klinken, G. (2018). Informality and citizenship: The everyday state in Indonesia. *Citizenship Studies*, 22(2), 95–111.
- Cahyani, F. P., Tohari, A., & Faisol. (2024). Analisis pengelolaan Dana Desa dalam meningkatkan pembangunan infrastruktur di Desa Karang Kecamatan Bareng Jombang. *Simposium Manajemen dan Bisnis III*, 3, 814–826.
- Fikriyah, K., Darmawan, A., & Hariyoko, Y. (2023). Analisis pengelolaan Dana Desa untuk pembangunan infrastruktur di Desa Sidomulyo Kecamatan Deket Kabupaten Lamongan (Tahun Anggaran 2020-2022). *PRAJA Observer: Jurnal Penelitian Administrasi Publik*, 3(4), 145–152.

- Hurriyaturohman, Indupurnahayu, & Septianingsih, P. (2021). Analisis pengelolaan Dana Desa dalam meningkatkan pembangunan desa (Studi kasus pada Desa Cibitung Wetan). *Jurnal Ilmiah Akuntansi dan Keuangan*, 16(1). Diambil dari <http://ejournal.uikabogor.ac.id/index.php/neraca/index>
- Indonesia Corruption Watch. (2020). *Laporan pemantauan dana desa*. Jakarta: ICW.
- Kementerian Desa PDTT. (2018). *Padat karya tunai desa: Konsep dan implementasi*. Jakarta: Kemendesa PDTT.
- Kementerian Keuangan Republik Indonesia. (2017). *Buku saku dana desa*. Jakarta: Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan.
- Ningsih, H. M., & Handayani, N. (2020). Analisis pelaksanaan alokasi Dana Desa dalam pemberdayaan masyarakat desa. *Jurnal Ilmu dan Riset Akuntansi*, 8(8), 1–23.
- OECD. (2015). *Public governance principles for public financial management*. Paris: OECD Publishing.
- Piani, E. O., Jusmani, & Oktariansyah. (2024). Analisis penggunaan Dana Desa untuk pembangunan infrastruktur (Studi kasus di Desa Serdang). *Jurnal Mediasi*, 7(1), 44–57.
- Republik Indonesia. (2014). *Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa*. Jakarta: Kemendagri.
- Rusdi, A. (2021). Analisis pengelolaan Alokasi Dana Desa (ADD) bidang sektor pembangunan infrastruktur di Desa Titian Modang Kopah Kecamatan Kuantan Tengah Kabupaten Kuantan Singingi. *Jurnal Ilmu Sosial Universitas Islam Kuantan Singingi*, 1(1), 1–13.
- Sujarweni, V. W. (2015). *Akuntansi desa: Panduan tata kelola keuangan desa*. Yogyakarta: Pustaka Baru Press.
- Suratmoko, B. (2024). Analisis pengelolaan alokasi Dana Desa dalam pembangunan infrastruktur di Desa Pangkoh Sari, Kecamatan Pandih Batu Kabupaten Pulang Pisau. *AL-MIKRAJ: Jurnal Studi Islam dan Humaniora*, 5(01), 410–418. <https://doi.org/10.37680/almikraj.v5i01.5839>
- Syam, M. S., Herman, & Mappigau, E. (2023). Analisis dampak kebijakan Dana Desa dalam peningkatan infrastruktur, kesejahteraan dan partisipasi masyarakat Desa Sanjango. *SEIKO: Journal of Management & Business*, 6(2), 214–222.
- Thandriyono, S., Mattulada Amir, A., & Nurhadi. (2024). Analisis pengelolaan Dana Desa dalam meningkatkan pembangunan di Desa Kotaraya Barat Kecamatan Mepanga Kabupaten Parigi Moutong. *Jurnal Kolaboratif Sains*, 7(4), 1425–1430. Diambil dari <https://jurnal.unismuhpalu.ac.id/index.php/JKS>
- Todaro, M. P., & Smith, S. C. (2015). *Economic development* (12th ed.). London: Pearson Education.
- UNDP. (2014). *Governance for sustainable development*. New York: UNDP.
- World Bank. (2017). *World development report 2017: Governance and the law*. Washington, DC: World Bank Publications.
-